



---

## Solidaritas Bagi Pasifik Selatan: Analisis Kebijakan Luar Negeri Selandia Baru dalam Menanggapi Isu Perubahan Iklim pada masa Pemerintahan Jacinda Ardern

**Lyra Asaria Uthan, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian**  
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Since Jacinda Ardern's period as a prime minister in New Zealand, the country has contrasted climate change policy with the previous prime minister. Ardern's concern about climate change leads New Zealand to change the countries' diplomatic relations and add its foreign aid to the Pacific Islands countries. New Zealand's orientation and concern for the regional climate change crisis show a shift in Jacinda Ardern's leadership with her predecessor. This research aims to answer the research question: "Why does New Zealand actively participate in Pacific Island's climate change crisis during Jacinda Ardern Presidency?". This study aims to explain the role of Jacinda Ardern's ideas in shaping the climate change policy in the Pacific Islands. This research is explanative research using the desk research method. This study uses the framework of Ideas and Foreign policy by Judith Goldstein and Robert O. Keohane on answering which type of idea and how the policy-making mechanism that Ardern used.*

**Keywords:** *climate change, Jacinda Ardern, Pacific Islands, Foreign Policy, Foreign Aid*

### **PENDAHULUAN**

Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan bagi negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Pasalnya, berdasarkan pemantauan dari satelit, didapati bahwa permukaan air laut wilayah Pasifik mengalami kenaikan sebanyak 3-6mm per tahun selama periode 1993 sampai dengan 2017 (Oakes et al., 2017). Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *The Pacific Climate Change Science Programme* (PCCSP), kepulauan Pasifik diperkirakan akan mengalami kenaikan air laut yang sangat signifikan pada tahun 2080-2099, yaitu sekitar 0,18 sampai dengan 0,59 meter (Oakes et al., 2017). Hal ini membuat wilayah Kepulauan Pasifik menjadi sangat rentan.

Selandia Baru sebagai salah satu negara maju di wilayah Pasifik menunjukkan peran aktifnya dalam isu krisis perubahan iklim utamanya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Dibandingkan dengan rezim sebelumnya, pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern cukup ambisius dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan krisis perubahan iklim baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Sebagai bukti, pada saat kampanye tahun 2017, Ardern menyatakan bahwa isu perubahan iklim merupakan isu krusial yang ia sebut dengan istilah "*my generation's nuclear free moment*" (Gower, 2017).

Saat terpilih sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, kebijakan progresif Jacinda Ardern terkait lingkungan mulai diimplementasikan. Salah satu wacana kebijakan yang ditawarkan pada tahun 2017 adalah “*an experimental visa*” atau “*climate refugee visa*” untuk penduduk Pasifik yang terkena dampak dari perubahan iklim (Godin, 2020). Rencana ini kemudian menuai pujian dari dunia internasional. Sebagai sebuah negara yang sebelumnya menolak mengenai status pengungsi perubahan iklim, Selandia Baru dianggap memberikan sebuah gebrakan baru. Pasalnya, Sejak tahun 2011, sudah ada 11 kasus terkait dengan klaim status sebagai *climate refugee* atau klaim pengungsi perubahan iklim yang ditolak oleh otoritas Selandia Baru (Walters, 2019). Kendati kebijakan ini batal untuk diimplementasikan, hal itu bukan berarti peran Selandia Baru absen dalam isu krisis perubahan iklim di Pasifik. Selandia Baru meningkatkan alokasi dananya sebesar \$300 untuk krisis iklim secara global yang mana setengahnya dikhususkan untuk membantu proses mitigasi dan adaptasi isu krisis perubahan iklim di wilayah Pasifik (New Zealand Government, 2019). Dalam *New Zealand’s Pacific and Development Plan 2019-2022*, Selandia Baru berkomitmen untuk aktif dalam menangani isu krisis perubahan iklim di Pasifik. Komitmen ini juga ditandai dengan kehadiran Ardern dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di negara-negara Pasifik, penekanannya pada *Boe Agreement* dan perumusan kebijakan *Pacific Reset* (New Zealand Government, 2019).

Peran aktif ini kontras dengan posisi Selandia Baru pada masa pemerintahan Perdana Menteri Bill English. Walau pada pemerintahan English tidak sepenuhnya anti pada perubahan iklim, tetapi pemerintahan sebelumnya tidak mengeluarkan kebijakan apapun berkaitan dengan perubahan iklim. Sebagai bukti, kabinet English memutuskan untuk tidak melegitimasi undang-undang terkait pembatasan karbon di Selandia Baru (Grieverson, 2017). English berpandangan bahwa posisi Selandia Baru cukup moderat dalam menanggapi isu perubahan iklim dengan posisinya yang menandatangani Perjanjian Paris. Selain itu, pemerintahan Bill English dan John Key (Partai Nasional) juga tidak mengeluarkan kebijakan apapun terkait isu lingkungan sehingga hal tersebut cukup kontras dengan Selandia Baru di masa pemerintahan Jacinda Ardern.

Tulisan ini juga berusaha untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Almira Ulimaz Kamka membahas mengenai sekuritisasi dan upaya perlindungan status *climate refugee* Selandia Baru pada masa pemerintahan Jacinda Ardern. Tulisan ini menyatakan bahwa status *climate refugee* menjadi sebuah masalah keamanan di Selandia Baru yang membuat Jacinda Ardern meningkatkan perlindungan pada status pengungsi perubahan iklim Pasifik di Selandia Baru (Kamka, 2020). Sayangnya tulisan ini justru menggunakan teori sekuritisasi, padahal status *climate refugee* dan isu keamanan sendiri sebenarnya merupakan ancaman nyata dan masalah keamanan yang tidak perlu dikonstruksi menggunakan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penulis menawarkan cara pandang baru mengenai kebijakan Selandia Baru terhadap perubahan iklim, bukan hanya sekadar kebijakan *climate refugee* saja tetapi peran aktif Selandia Baru menggunakan kerangka teori perubahan kebijakan luar negeri yang mana ide dan gagasan dari Jacinda Ardern berperan penting dalam membentuk kebijakan tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Simon Mark, menjelaskan mengenai bagaimana perubahan gaya diplomasi publik Selandia Baru terhadap negara-negara di Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Jacinda Ardern melalui kebijakan *Pacific Reset* (Mark, 2021). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, Simon Mark menjelaskan bahwa perubahan kebijakan Selandia Baru menjadi lebih dekat dengan Pasifik Selatan disebabkan oleh adanya pengaruh domestik dan nilai yang dimiliki oleh Selandia Baru,

sedangkan penelitian ini hanya akan meneliti secara spesifik mengenai peran Selandia Baru di Pasifik pada isu perubahan iklim yang disebabkan oleh adanya gagasan dan cara pandang Jacinda Ardern mengenai isu perubahan iklim di Pasifik.

Lantas, peran aktif Selandia Baru dalam menangani isu krisis perubahan iklim di wilayah Pasifik ini menarik untuk diteliti karena adanya perubahan kebijakan dengan rezim sebelumnya. Tulisan ini ingin meneliti mengapa Selandia Baru berperan aktif pada isu krisis perubahan iklim di Pasifik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern dengan menggunakan kerangka berpikir teori peran ide dan gagasan dalam kebijakan luar negeri yang digagas oleh Judith Goldstein dan Robert Keohane. Jacinda Ardern menjadi unit analisis dalam penelitian ini dikarenakan perannya yang secara vokal menyuarakan pmengenai isu lingkungan sejak kampanyenya menjadi Perdana Menteri.

## PEMBAHASAN

### ***Gagasan Pembentuk Kebijakan Perubahan Iklim Selandia Baru (Principled Belief)***

Adapun *principled belief* berkaitan dengan bagaimana pembuat kebijakan memandang sebuah isu sebagai hal yang baik atau buruk, pantas atau tidak pantas (Goldstein & Keohane, 1993:9). Oleh karena itu, kebijakan perubahan iklim yang dibuat sebenarnya banyak ditujukan untuk negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Penyampaian ide dan gagasan ini dapat terlihat dengan jelas melalui pidato, wawancara, serta pernyataan Jacinda Ardern mengenai krusialnya isu perubahan iklim di Pasifik Selatan.

Ardern menekankan mengenai posisi Selandia Baru dan tanggung jawabnya untuk membantu negara-negara Pasifik Selatan. Ardern menyatakan dalam pidato utamanya di PBB mengenai perubahan iklim:

*“... The challenge of climate change requires us to look beyond our domestic borders, and in New Zealand’s case towards the Pacific. The focus of this financial support is on creating new areas of growth and opportunity for Pacific communities (Ardern, 2018)”*

Konsepsi bantuan yang dimiliki Ardern adalah berupa bantuan internasional di bidang perubahan iklim. Ardern memandang bahwa adanya bantuan dari Selandia Baru merupakan bentuk tanggung jawab negara tersebut. Posisi Selandia Baru sebagai tetangga dan bagian dari Pasifik Selatan memberikan tanggungjawab bagi Selandia Baru untuk membantu negara-negara Pasifik Selatan. Bantuan yang diberikan oleh Selandia Baru juga berfokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan kawasan.

Pemberian bantuan luar negeri Selandia Baru yang terus meningkat kepada Pasifik Selatan menunjukkan komitmen Ardern dalam membantu negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Adanya konsepsi bantuan ini muncul karena posisi Selandia Baru sebagai bagian dari Pasifik Selatan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Selandia Baru membantu Pasifik Selatan. Ardern menyatakan bahwa:

*“This funding [climate finance] will complement our ongoing support to help developing countries in the Pacific (Ardern, 2018)”*

Tanggung jawab Selandia Baru untuk membantu negara Pasifik Selatan juga disampaikan Ardern sebagai berikut:

*“Our focus has very much been on our responsibilities, this is our region. We are members of the Pacific.”(McCullough, 2019)*

Melalui pernyataan tersebut, terlihat bahwa konsepsi bantuan yang dimiliki Ardern adalah bantuan internasional sebagai bentuk tanggung jawab dan keberadaan Selandia Baru sebagai bagian dari Pasifik Selatan. Penggunaan kata seperti ‘*neighbours*’, ‘*family*’,

'fellow', 'us', dan 'our' yang digunakan oleh Ardern dalam pidatonya, menunjukkan pandangan Ardern bahwa Selandia Baru merupakan keluarga dari negara-negara Pasifik Selatan. Rasa kepemilikan dan kekeluargaan ini yang kemudian mendorong munculnya urgensi Selandia Baru untuk memberikan bantuan terhadap negara-negara Pasifik Selatan.

Fokus bantuan yang diberikan Selandia Baru bagi negara-negara Pasifik Selatan adalah dalam isu perubahan iklim. Jacinda Ardern memandang isu perubahan iklim sebagai "*greatest threat*" atau ancaman terbesar di bidang lingkungan dan ekonomi dengan menyatakan bahwa:

*"So for me, alongside pandemic management, we need to make progress on our greatest environmental and economic threat: climate change"*(McKay, 2021)

Bukan hanya sekali, dilansir dari media Selandia Baru yaitu *Newsroom*, Ardern menyatakan bahwa:

*"...This is [climate change] the biggest crisis humanity has ever faced."*(Sachdeva, 2019)

Label yang diberikan Ardern mengenai perubahan iklim sebagai krisis kemanusiaan dan ancaman terbesar kemudian mendorong terbentuknya pandangan baru, yaitu sebagai bagian dari Selandia Baru, adalah hal yang baik bagi Selandia Baru untuk membantu negara-negara wilayah Pasifik Selatan dari bahaya dampak perubahan iklim di masa depan. Isu perubahan iklim dipandang sebagai ancaman kemanusiaan yang berarti merupakan hal yang buruk, sehingga sikap Selandia Baru tentu adalah membantu negara-negara tersebut karena itu merupakan hal yang dipandang baik.

Adapun narasi mengenai kekeluargaan Selandia Baru di bidang perubahan iklim sudah disampaikan Ardern sejak tahun 2017 saat awal mula Ardern mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Selandia Baru. Dalam kampanyenya, Ardern menggunakan jargon "*my generation free-nuclear moment*" dalam membahas urgensi isu perubahan iklim. Jargon ini menjadi kalimat yang paling dikenal media mengenai Jacinda Ardern tiap kali membahas mengenai isu perubahan iklim di Selandia Baru. Penggunaan "*nuclear-free moment*" menggambarkan bagaimana dewasa ini isu perubahan iklim merupakan sebuah momentum penting bagi generasi saat ini.

*My generation* dapat diartikan sebagai warga negara Selandia Baru – bahkan dunia saat ini. *Nuclear-free moment* selain diartikan sebagai momentum penting, dapat juga mengacu mengenai kebijakan bebas nuklir Selandia Baru yang digagas oleh David Lange. Dalam hal ini, kebijakan bebas nuklir disamakan dengan isu perubahan iklim oleh Ardern karena isu perubahan iklim sama halnya dengan kebijakan bebas nuklir merupakan sebuah gebrakan baru kepemimpinan Ardern. Klaim Ardern mengenai perubahan iklim sebagai momen bebas nuklir Selandia Baru, menjadi pertanda bahwa perubahan iklim adalah sebuah isu baru yang menjadi momentum penting bagi Selandia Baru.

Peggunaan istilah "*my generation nuclear free moment*" tidak hanya digunakan sekali saat kampanye Ardern. Pada Februari 2019, sekitar sepuluh ribu anak-anak sekolah menengah atas Selandia Baru melakukan demonstrasi untuk menuntuk pemerintah melakukan lebih banyak hal terkait dengan penanganan isu perubahan iklim (Daniell & MmCarthy, 2019). Ardern menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa:

*"...keep marching". I still stand by that statement – this is the next generation's nuclear-free moment – but there are some distinct differences..."* (Daniell & MmCarthy, 2019)

Dalam tulisan tersebut, Ardern memberikan garis besar kebijakan luar negerinya

selama memerintah. Salah satu area penting kebijakannya adalah terkait dengan perubahan iklim. Dalam hal ini, Ardern menekankan kembali mengenai posisi Selandia Baru di wilayah Pasifik Selatan. Ardern menggunakan kata “*our relationship*” untuk menggambarkan bahwa antara Selandia Baru dan negara-negara Pasifik lainnya memang memiliki hubungan khusus. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komunitas Pasifik, Selandia Baru merasa sudah sepantasnya untuk membantu dan peduli dengan isu perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim terhadap kawasan Pasifik Selatan yang dipandang membahayakan, mendorong Ardern untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas bantuan internasionalnya. Dilansir dari laman resmi Pemerintah Selandia Baru, Jacinda Ardern menyatakan:

“*Climate change is a priority for the Government because it’s a threat to our economy, our environment and our everyday lives.*” (Ardern & Shaw, 2021)

Dalam hal ini, konsepsi Jacinda Ardern mengenai perubahan iklim adalah hal yang buruk. Ardern menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bagi berbagai sektor yaitu ekonomi, lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Menempatkan perubahan iklim sebagai prioritas pemerintahan menandakan bahwa perubahan iklim merupakan isu krusial yang menjadi fokus pemerintahan Ardern

Aktifnya Ardern dalam menyuarakan mengenai isu perubahan iklim, membuktikan bahwa Ardern memiliki pandangan terhadap isu perubahan iklim. Gagasan perubahan iklim yang dipegang Ardern adalah perubahan iklim merupakan ancaman bagi manusia. Dampak dari perubahan iklim dapat mengancam wilayah Pasifik Selatan oleh karena itu perubahan iklim merupakan hal yang buruk. Isu perubahan iklim yang dipandang sebagai ancaman ini, mendorong Ardern untuk membuktikan tanggungjawab Selandia Baru terhadap wilayah Pasifik Selatan. Rentannya Pasifik Selatan terhadap dampak perubahan iklim

Pandangan normatif Ardern juga dibuktikan melalui beberapa kebijakan, bantuan internasional, serta peran aktif dalam forum internasional dan regional. Adapun rincian pendanaan untuk kebijakan perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Daftar Pendanaan Perubahan Iklim Selandia Baru tahun 2018

Negara	Agenda	Jumlah (Dollar Selandia Baru)
<b>Nauru</b>	Penanaman energi surya	4 Juta
<b>Kepulauan Marshall</b>	Pemetaan listrik untuk dekarbonisasi	1 juta
<b>Samoa</b>	Pendanaan <i>Pacific Climate Change Centre</i>	3,5 juta
<b>Niue</b>	Meningkatkan pembangunan energi terbarukan	Tidak disebutkan, peningkatan mencapai 40%
<b>Seluruh Pasifik Selatan</b>	Penyuaraan isu perubahan iklim	4 juta
	Pemetaan mitigasi perubahan iklim	5 juta

Sumber: (New Zealand Government, 2019), diolah oleh penulis

Dalam pertemuan Pacific Island Forum tahun 2018 di Tuvalu, Ardern menyampaikan pidatonya di depan para pemimpin negara-negara Pasifik Selatan. Dalam pidato tersebut, Ardern acap kali menggunakan kata *'our'* untuk menegaskan bahwa masalah perubahan iklim adalah masalah bersama.

*"We recognise our neighbours in the Pacific region are uniquely vulnerable to the impacts of climate change"* (Pacific Media Centre, 2018).

*"Like our Pacific Island neighbours, we will continue that international call"*(Lyons, 2019)

Penggunaan kata *'our region'*, *'our neighbours'* menggambarkan bahwa Ardern memang ingin menekankan keberadaan Selandia Baru sebagai tetangga, keluarga dan bagian dari negara-negara Pasifik. Dalam hal ini, prinsip Ardern konsisten mengenai negara-negara Pasifik dan krusialnya dampak isu perubahan iklim kawasan tersebut.

Ardern juga menyatakan bahwa masalah perubahan iklim merupakan isu yang personal baginya. Hal ini dapat dikaitkan dengan latar belakang Ardern. Keluarga Ardern tinggal di salah satu negara Pasifik Selatan bernama Niue (Heron, 2018). Sebagaimana tituliskan dalam biografinya, ayah Ardern yang bernama David Ross Ardern sempat menjabat sebagai Komisioner Tinggi Niue (Duff, 2019:31). Kunjungannya ke Niue pada tahun 2018 merupakan rangkaian kunjungan ke negara-negara Pasifik Selatan. Terlebih, banyak warga negara Selandia Baru yang tinggal di Niue. Ardern bahkan memiliki julukan sebagai *"daughter of Niue"* karena posisi ayahnya sebagai Komisioner Tinggi Selandia Baru untuk Niue tahun (NZ Herald, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa memang Ardern memiliki kedekatan personal dengan negara-negara Pasifik Selatan dikarenakan keberadaan keluarganya yang berada di negara Niue yang merupakan bagian dari Pasifik Selatan. Oleh karena itu, dampak isu perubahan iklim merupakan agenda utama Ardern di wilayah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Ardern memiliki dua gagasan yang saling berhubungan terkait dengan keaktifannya dalam isu perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan. Konsepsi bantuan dipandang Ardern sebagai sebuah tanggung jawab dan merupakan hal yang baik. Selandia Baru yang mengklaim *'kekerabatan'* dan *'kekeluargaannya'* dengan negara-negara di Pasifik Selatan memberikan bantuan pada negara-negara tersebut karena memang itulah tanggung jawab Selandia Baru sebagai bagian dari Pasifik Selatan dan memang sepatasnya dilakukan. Selain itu, konsepsi lain yang dimiliki Ardern terkait dengan keaktifan Selandia Baru di Pasifik Selatan adalah mengenai isu perubahan iklim. Ardern memandang bahwa perubahan iklim merupakan ancaman di segala aspek oleh karena itu adanya dampak perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan merupakan hal yang buruk. Pandangan ini didorong karena Ardern memiliki kedekatan personal dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Keberadaan keluarga Ardern di Niue membuatnya menempatkan perhatian khusus terhadap wilayah Pasifik Selatan yang rentan terhadap perubahan iklim. Urgensi perubahan iklim kemudian mendorong Ardern untuk peduli dan membantu Pasifik Selatan.

### ***Mekanisme Kebijakan Perubahan Iklim Selandia Baru di Pasifik Selatan (Road Map)***

Dalam produk kebijakan luar negeri, pembuat kebijakan tentu memiliki mekanisme pembuatan kebijakan yang memungkinkan kebijakan tersebut mencapai tujuan. Menurut teori ide dan gagasan oleh Judith Goldstein dan Robert Keohane, *Road Map* merupakan mekanisme pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk memperjelas arah kebijakan dan mencegah ketidakpastian. Adapun mekanisme pembuatan kebijakan yang diadopsi Ardern untuk menyalurkan ide dan gagasannya adalah *Road Map*.

*Principled belief* memungkinkan pemimpin tersebut untuk bertindak tegas dan fokus dalam mengambil keputusan (Goldstein & Keohane, 1993:16-17).

Dapat dijabarkan bahwa *Road Map* rencana kebijakan Ardern dapat dibagi menjadi tiga fokus. **Pertama**, pada kasus munculnya istilah “*climate refugee*” pada masa pemerintahan Bill English, Ardern kemudian membuat rencana kebijakan mengenai “*Climate Refugee Visa*” atau disebut juga sebagai “*experimental humanitarian visa*” (Ghosh & Orchiston, 2020:27). Kondisi di negara Pasifik seperti Kiribati, mendorong Ardern untuk peduli pada isu perubahan iklim di kawasan tersebut. Kendati kebijakan tersebut tidak jadi diterapkan, Ardern memberikan alternatif kebijakan lain pada Kiribati dan negara-negara Pasifik Selatan seperti mengadakan kerjasama antara Pemerintah Kiribati dan Institut Nasional Penelitian Air dan Atmosfer Selandia Baru dalam mengembangkan keamanan pesisir di negara tersebut (Pala, 2020).

Ardern beralih dari membuat kebijakan yang bersifat “menampung” menjadi “mencegah”. Dari yang awalnya membuka Selandia Baru untuk negara-negara Pasifik Selatan, menjadi membantu negara-negara tersebut dalam memitigasi isu perubahan iklim. Dalam hal ini, *principled belief* yang dimiliki Ardern mendorongnya untuk bisa melihat lebih jauh mengenai masalah perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan. Penanganan isu perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan bergeser bukan lagi semata-mata memberikan bantuan instan tetapi juga membantu memitigasi isu tersebut agar penanganan yang diberikan memiliki dampak berkepanjangan.

**Kedua**, kebijakan *Pacific Reset* dikeluarkan pada masa pemerintahan Jacinda Ardern sebagai bentuk kepedulian Selandia Baru terhadap kawasan Pasifik Selatan. *The Pacific Reset* pertama kali diumumkan pada Maret 2018 oleh Kementerian Luar Negeri Selandia Baru (New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2019). Menurut mantan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, *Pacific Reset* merupakan respon terhadap masalah sosial dan lingkungan di kawasan tersebut yang melibatkan banyak aktor eksternal (Iati, 2021:145).

Adapun *Pacific Reset* merupakan kebijakan pembangunan Selandia Baru yang berfokus pada wilayah Pasifik Selatan dan melibatkan peran pemerintah maupun non-pemerintah. Program ini memberikan bantuan sekitar 714 juta Dollar dan tambahan 150 juta Dollar dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT) (Mark, 2020:2). Kebijakan ini juga berfokus pada memitigasi isu perubahan iklim di kawasan (Neilson, 2021).

Melalui kebijakan *Pacific Reset*, Selandia Baru menyalurkan bantuannya kepada negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Dalam isu perubahan iklim, melalui *Pacific Reset*, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta menyatakan bantuan pembangunan akan fokus pada ketahanan untuk melawan perubahan iklim (Neilson, 2021). Hal ini berarti pandangan Ardern mengenai kekeluargaan Selandia Baru juga diwujudkan dengan perubahan gaya diplomasi dan pemberian bantuan Selandia Baru ke Pasifik Selatan melalui *Pacific Reset*.

**Ketiga**, Ardern memmanifestasikan *principled belief* yang dipegangnya dengan beberapa kebijakan lain, yaitu meningkatkan pendanaan perubahan iklim bagi wilayah Pasifik Selatan, berperan aktif dalam forum regional dan melakukan berbagai kunjungan ke negara-negara Pasifik Selatan. Pada tahun 2019, bantuan sebesar 150 juta dollar diberikan untuk penanganan perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan (Ardern, 2019). Selain itu, Ardern juga berkomitmen dalam mendorong kerjasama keamanan antara negara pasifik melalui *The Boe Agreement* atau *The Boe Declaration* di Pacific Island Forum. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh Ardern, mendorongnya untuk melakukan

beragam upaya dalam membantu negara-negara di Pasifik Selatan dalam mencegah dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, ide yang dimiliki Ardern mengenai negara-negara di Pasifik Selatan membantunya untuk melihat masalah yang ada di kawasan tersebut – utamanya masalah perubahan iklim – untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan gaya diplomasi yang diterapkan oleh Selandia Baru.



Gambar 1. Alur Mekanisme Pembuatan Kebijakan (Goldstein & Keohane, 1993), diolah oleh penulis

Mengacu pada gambar 3.1, pandangan Ardern mengenai negara Pasifik Selatan adalah tetangga dan keluarga dari Selandia Baru mendorong Ardern untuk memiliki *principled belief* atau prinsip bahwa perubahan iklim merupakan ancaman sehingga membantu negara Pasifik Selatan adalah hal yang baik mengingat Selandia Baru adalah bagian dari Pasifik Selatan. Melalui pandangan tersebut, Ardern dapat menentukan kebijakan perubahan iklim apa yang tepat bagi Pasifik Selatan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan adalah berkaitan dengan bantuan pembangunan untuk Pasifik Selatan serta memperkuat kerjasama regional melalui Pacific Island Forum.

Dapat disimpulkan bahwa adanya pandangan yang dipegang Ardern mengenai posisi negara-negara Pasifik Selatan merupakan pandangan normatif yang mendorong Ardern untuk melihat pentingnya isu perubahan iklim di kawasan tersebut. Melalui mekanisme kebijakan *road map*, Ardern dapat melihat apa saja masalah perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Melalui mekanisme kebijakan *road map*, membantu Ardern untuk melihat urgensi dan solusi yang tepat bagi masalah perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan.

## KESIMPULAN

Perubahan kebijakan luar negeri di bidang perubahan iklim Selandia Baru disebabkan oleh adanya ide dan gagasan Jacinda Ardern. Adapun tipe ide dan gagasan yang dipegang oleh Jacinda Ardern adalah *principled belief*. Pandangan ini mendorong Ardern melihat bahwa membantu negara-negara Pasifik Selatan adalah hal yang baik. Ardern melihat bahwa negara-negara Pasifik Selatan adalah tetangga dan keluarga Selandia Baru. Prinsip untuk membantu negara-negara di wilayah Pasifik Selatan didorong oleh adanya urgensi bahaya perubahan iklim kawasan tersebut. Ardern memandang bahwa isu perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi Pasifik Selatan. Pandangan bahwa isu perubahan iklim merupakan hal yang buruk mendorong pemerintahan Selandia Baru menjadikan isu ini sebagai prioritas. Posisi Selandia Baru yang merupakan bagian dari Pasifik Selatan mendorong adanya rasa tanggung jawab



untuk membantu kawasan. Selain itu, dampak perubahan iklim yang dipandang sebagai hal yang buruk sehingga sudah sepatutnya Selandia Baru membantu negara-negara Pasifik Selatan.

Pandangan Ardern terkait dengan pentingnya isu perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan juga didorong karena kedekatan personal yang dimilikinya. Keluarga Ardern berada di Niue yang merupakan salah satu negara di wilayah Pasifik Selatan. Ardern juga dijuluki sebagai '*Daughter of Niue*' karena memang ayah dan keluarganya berada di negara tersebut. Selain itu, ayah Ardern juga pernah menjabat sebagai Komisioner Tinggi di negara-negara Pasifik Selatan. Alasan personal ini juga mendorong mengapa Ardern sangat peduli pada isu perubahan iklim di wilayah Pasifik Selatan.

Adapun mekanisme pembuatan kebijakan perubahan iklim Selandia Baru di wilayah Pasifik Selatan adalah *Road Map*. Dalam hal ini, prinsip yang dipegang Ardern membantunya untuk melihat masalah perubahan iklim di Pasifik Selatan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memecahkan permasalahan. Mengingat wilayah Pasifik Selatan merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, maka fokus kebijakan bantuan luar negeri Ardern adalah di bidang perubahan iklim. Ada tiga inti utama kebijakan Ardern di bidang perubahan iklim kawasan Pasifik Selatan, yaitu: bersifat mencegah daripada menampung (adaptif), memperkuat kerjasama kawasan (kolaboratif), dan meningkatkan bantuan pembangunan berkepanjangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama dan kedua yaitu Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. dan Bapak Muhammad Faizal Alfian S.I.P., M.A yang telah membimbing selama penulisan skripsi. Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

## REFERENSI

- Ardern, J. (2018, September 25). *New Zealand increases climate finance commitment to Pacific*. New Zealand Government. <https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-increases-climate-finance-commitment-pacific>
- Ardern, J. (2019). *NZ boosts support for climate action across the Pacific*. The Official Website of the New Zealand Government. <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-boosts-support-climate-action-across-pacific>
- Ardern, J., & Shaw, J. (2021, October 31). *Govt increases contribution to global climate target*. Official Website of the New Zealand Government. <https://www.beehive.govt.nz/release/govt-increases-contribution-global-climate-target>
- Daniell, J., & McCarthy, N. (2019, April 15). *It's urgent. And it's political: Jacinda Ardern on climate change*. The Spinoff. <https://thespinoff.co.nz/partner/auckland-zoo/15-04-2019/its-urgent-and-its-political-jacinda-ardern-on-climate-change>
- Duff, M. (2019). Public School Girls. In *Jacinda Ardern: The Story Behind an Extraordinary Leader*. Allen & Unwin.
- Ghosh, R. C., & Orchiston, C. (2020). Climate-introduced Migration in the Pacific: The Role of New Zealand. In *NZAIA* (Vol. 5, Issue 4). Victoria University of Wellington Library. <https://doi.org/10.26686/pq.v5i4.4312>
- Godin, M. (2020, January 20). *Climate Refugees Cannot Be Sent Home, U.N. Rules* | Time. TIME. <https://time.com/5768347/climate-refugees-un-ioane-teitiota/>
- Goldstein, J., & Keohane, R. O. (1993). *Ideas and Foreign Policy Beliefs, Institutions, and*

- Political Change*. Cornell University Press.
- Gower, P. (2017, August 20). *Patrick Gower: Jacinda Ardern's climate change line an absolute banger*. Newshub. <https://www.newshub.co.nz/home/election/2017/08/patrick-gower-jacinda-ardern-s-climate-change-line-an-absolute-banger.html>
- Grieverson, L. (2017, August 9). *Stark contrast emerges on climate policy*. Stuff. <https://www.stuff.co.nz/national/politics/95592679/stark-contrast-emerges-on-climate-policy>
- Heron, M. (2018, March 6). *PM's Pacific Island trip becomes a family reunion*. RNZ News. <https://www.rnz.co.nz/news/political/351887/pm-s-pacific-island-trip-becomes-a-family-reunion>
- Iati, I. (2021). *China's Impact on New Zealand Foreign Policy in the Pacific: The Pacific Reset*. In *The China Alternative*. ANU Press. <https://about.jstor.org/terms>
- Kamka, A. U. (2020). *Sekuritisasi Dan Perlindungan Terhadap Climate Refugee: Studi Kasus Selandia Baru Di Bawah Kepemimpinan Jacinda Ardern*.
- Lyons, K. (2019, May 8). *New Zealand introduces bill for zero carbon emissions by 2050* | *New Zealand* | *The Guardian*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2019/may/08/new-zealand-introduces-bill-for-zero-carbon-emissions-by-2050>
- Mark, S. (2020). *New Zealand's public diplomacy in the Pacific: a reset, or more of the same?* *Place Branding and Public Diplomacy*. <https://doi.org/10.1057/s41254-020-00196-x>
- McCullough, Y. (2019, July). *Prime Minister Jacinda Ardern to tackle climate change conversation in Tuvalu* | *RNZ News*. RNZ News. <https://www.rnz.co.nz/news/political/396622/prime-minister-jacinda-ardern-to-tackle-climate-change-conversation-in-tuvalu>
- McKay, B. (2021, December 24). *Ardern eyes climate change progress in NZ* | *7NEWS*. AAP. <https://7news.com.au/politics/ardern-eyes-climate-change-progress-in-nz-c-5072043>
- Neilson, M. (2021, November 3). *Foreign Minister Nanaia Mahuta on Pacific "reset" to "resilience" and China's growing influence*. NZ Herald. <https://www.nzherald.co.nz/nz/foreign-minister-nanaia-mahuta-on-pacific-reset-to-resilience-and-chinas-growing-influence/ACLCKML5ZTL3HQMPQU2WTAYUZI/>
- New Zealand Government. (2019, August 15). *NZ boosts support for climate action across the Pacific*. Beehive.Govt.Nz. <https://www.beehive.govt.nz/release/nz-boosts-support-climate-action-across-pacific>
- New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2019). *Case Study: The Pacific Reset - A Year On*. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. <https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/mfat-annual-reports/mfat-annual-report-2018-19/case-study-the-pacific-reset-a-year-on/>
- NZ Herald. (2018, March 5). *Prime Minister Jacinda Ardern's family affair on Pacific trip*. NZ Herald. <https://www.nzherald.co.nz/nz/prime-minister-jacinda-arderns-family-affair-on-pacific-trip/67SMQLBKRIZWA5W2YDVKVVHGKY/>
- Oakes, R., Milan, A., Campbell, J., Warner, K., & Schindler, M. (2017). *Climate Change and Migration in the Pacific: Links, Attitude, and Future Scenarios in Nauru, Tuvalu, and Kiribati*. <http://collections.unu.edu/community/UNU:1882>
- Pacific Media Centre. (2018, October 7). *Climate change advocacy calls for more 'action' response to Ardern's UN plea* | *Asia Pacific Report*. Asia Pacific Report. <https://asiapacificreport.nz/2018/10/07/climate-change-advocacy-calls-for-more-action-response-to-arderns-un-plea/>
- Pala, C. (2020, July 10). *Kiribati's president's plans to raise islands in fight against sea-level*

*rise*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2020/aug/10/kiribatis-presidents-plans-to-raise-islands-in-fight-against-sea-level-rise>

Sachdeva, S. (2019, September 28). *Ardern maintains a brave face amidst global uncertainty*. Newsroom. <https://www.newsroom.co.nz/ardern-maintains-a-brave-face-amidst-global-uncertainty>

Walters, L. (2019, April 24). *NZ plans for inevitable climate-related migration*. Newsroom. <https://www.newsroom.co.nz/2019/04/24/548955/nz-planning-for-inevitable-climate-related-migration>